

ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Hambali, Khumaidi, Aminullah

ABSTRAK

Pandangan yang muncul terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menyebabkan Pemerintah daerah wajib mengambil kebijakan yang bersifat ganda (*double standart*), satu sisi harus mengandung nilai positif bagi keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima, disisi yang lain Pemerintah juga harus menjaga kondisi keasrian keindahan dan kenyamanan suasana kota. Munculnya Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu atribut informal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakmampuan sektor formal untuk menampung keberadaan mereka, hal tersebut disebabkan kegagalan pembangunan perekonomian kota. Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan misalnya, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pedagang kaki Lima

PENDAHULUAN

Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan misalnya, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Negara Indonesia, Provinsi serta Kabupaten/Kota pada khususnya, Kota Pasuruan juga membuat suatu peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda yang dimaksud adalah Perda No. 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan, Perda ini dibuat dalam rangka menata dan menertibkan PKL yang berada di beberapa tempat strategis wilayah Kota Pasuruan. Tempat-tempat strategis yang biasa ditempati PKL tersebut seperti pinggir-pinggir (bahu) jalan, trotoar, dan beberapa pasar yang berada di Kota Pasuruan.

Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah berkaitan dengan kelancaran lalu lintas,

stabilitas sosial yang berkaitan dengan pemakaian fasilitas dan ruang publik seperti bahu jalan, trotoar dan menjaga keindahan dan keasrian Kota Pasuruan serta berupaya mengatur segala bentuk kegiatan PKL baik penataan tempat maupun alokasi waktu diperbolehkannya PKL untuk melakukan kegiatan usahanya. Didalam Perda No. 02 Tahun 2013 menjelaskan beberapa substansi tentang penjelasan PKL, penjelasan tempat atau kawasan yang disahkan bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya, sarana dan prasarana yang dipakai oleh PKL dalam melakukan usahanya, serta penjelasan tentang larangan-larangan serta sanksi-sanksi bagi PKL jika melanggar peraturan tersebut.

Keberadaan PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang *urgen* untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Diantaranya keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu fasilitas publik, memakai hak publik dalam hal trotoar jalan atau yang lebih kita kenal dengan istilah kembang trotoar.

Perkembangan PKL di kota Pasuruan sangat pesat sekali, hal ini diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan di desa,

akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota dengan alasan mencari penghidupan yang lebih layak. Faktor lain diakibatkan dari banyaknya orang-orang yang di PHK dari perusahaan pada akhirnya PKL menjadi pilihan lapangan pekerjaan dengan alasan Usaha PKL dinilai tidak rumit dan sangat memungkinkan orang-orang untuk tetap bisa hidup dalam menopang perekonomiannya.

Keberadaan PKL di kota Pasuruan terutama PKL yang berada di sekitar Kota Pasuruan sudah dinilai sangat memprihatinkan karena keberadaan mereka mengakibatkan banyak faktor negatif, diantaranya mengganggu lancarnya lalu lintas, buruknya pandangan kota karena mereka cenderung bikin kumuh dan kotor sehingga berimbas pada kondisi kota yang tidak sedap dipandang. Pada sudut yang berbeda ada hal positif yang ditimbulkan dengan keberadaan mereka diantaranya, masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan konsumsi yang murah, secara tidak langsung juga dengan keberadaan mereka menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan.

KERANGKA TEORI

EKONOMI POLITIK

Ekonomi politik merupakan sebuah pendekatan lain dalam kajian ekonomi maupun politik. Meskipun keduanya adalah dua kajian yang berbeda namun keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ekonomi tidaklah berada dalam ruang hampa yang bebas dari pengaruh dinamika politik, demikian juga politik tidak bisa lepas dari dinamika perekonomian.

Sama halnya dijelaskan oleh Ahmad Erani Yustika (2009) bahwa meskipun analisis ekonomi dan analisis politik berbeda karena memiliki dasar yang berbeda namun dalam pendekatan ekonomi dapat mengaitkan penyelenggaraan politik baik yang menyangkut proses, aspek maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Artinya mekanisme pasar, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya dipengaruhi dinamika politik yang sedang terjadi Lebih lanjut *Ahmad Erani Yustika*, ekonomi politik percaya struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan

ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (*given*). Hal ini dapat dilihat bagaimana sistem politik yang menganut liberalisasi sehingga membuat kita terperosok dalam demokrasi liberal. Demokrasi yang memberi keleluasaan pada siapa saja untuk berkompetisi, asalkan memiliki kemampuan terutama finansial karena mahalnya biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh para elite ekonomi (pengusaha) untuk ikut berkontestasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada juga yang melakukannya secara tidak langsung dengan menunjuk atau mendukung salah satu kandidat wakil rakyat dengan sokongan dana yang besar.

Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain kekuasaan tertentu dari sistem ekonomi yang berlangsung, sehingga *Ahmad Erani Yustika* mengatakan pendekatan ekonomi politik dalam prakteknya selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian wajar jika kebijakan selalu mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Apalagi sekarang, Indonesia memasuki fase perpolitikan era desentralisasi. Sistem politik yang terbuka dan lemahnya kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan sehingga kebijakan ekonomi sangat rentan dengan kepentingan politik. Terlebih sejalan dengan konsep demokrasi kita yang liberal dan ekonomi yang neoliberal, maka politik akan terjebak pada biaya politik yang mahal. Tak pelak lagi, kekuasaan pemodal yang memainkan peran besar dalam kebijakan ekonomi. Hingga berujung pada pendiktean institusi politik maupun ekonomi yang diarahkan pada kepentingan para pemilik modal.

Menurut Mochtar Mas'ood (2008) mendefinisikan ekonomi politik sebagai keterkaitan antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar atau antara negara dan masyarakat. Dua aspek ini memang tidak bisa dipisahkan bahkan setiap kebijakan politik yang menjadi prioritas utama yang selalu ditemukan adalah kepentingan ekonomi.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Model Analisis Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1978) dalam Wahab (2008) membagi model analisis kebijakan publik dalam enam buah model, yaitu: Model Kelembagaan, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem.

Model Kelembagaan

Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik yang memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintahan sejak lama memang menjadi pusat perhatian ilmu politik, bahkan ilmu politik sering disebut sebagai suatu ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga pemerintah (government institutional).

Model Kelompok

Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok.

Model Elit

Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Dengan mengacu pada hasil karya para teoritis elit klasik, C. Wright Mills (1956) dalam Wahab (2008) mengungkapkan adanya suatu gejala konsentrasi kekuasaan politik di tangan sekelompok kecil warga masyarakat. Dalam model elit ini, kebijakan publik dipandang sebagai Preferensi Elit.

Model Rasional

Model pembuatan kebijakan publik

rasional barangkali akar-akar pemikirannya dapat dilacak pada karya Herbert Simon yang berjudul *Administration Behaviour*. Sesuai dengan karya ini maka dalam model rasional, kebijakan publik pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencapaian tujuan secara efisien.

Model Inkremental

Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dapat dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Model Sistem

Model sistem pada awalnya adalah sebuah model yang dikembangkan oleh para ahli biologi. Model ini kemudian diterapkan pada studi politik atau studi kebijakan publik oleh ilmuwan politik Amerika David Easton. Easton berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri dari jumlah proses-proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem.

Model kebijakan yang paling baik menurut Lester dan Stewart adalah model elitis dan model pluralis.

Model Elitis

Di sebagian besar negara-negara berkembang dan negara yang mendasarkan diri pada sistem otoriter, seperti misalnya Kuba dan Korea Utara, model elitis merupakan model yang cukup baik untuk menganalisis kebijakan publik yang berlangsung di negara-negara tersebut. Model ini mempunyai asumsi bahwa kebijakan publik dapat dipandang sebagai nilai-nilai dan pilihan-pilihan dari elit yang memerintah. Argumen pokok dari model ini adalah bahwa bukan rakyat atau "massa" yang menentukan kebijakan publik melalui tuntutan-tuntutan dan tindakan mereka, tetapi

kebijakan publik ditentukan oleh elit yang memerintah dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintah yang berada di bawahnya.

Model Pluralis

Berkebalikan dengan model elit yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit politik, maka model pluralis lebih percaya pada peran subsistem-subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Di negara-negara berkembang model elitis akan cukup memadai untuk menjelaskan proses politik yang berlangsung, namun akan kesulitan dalam menjelaskan proses politik di negara yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.

Pandangan-pandangan pluralis disarikan dari ilmuwan Robert Dahl dan David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut:

- a. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat maka hubungan-hubungan kekuasaan tersebut tidak akan nampak, hubungan ini akan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat.
- c. Tidak ada pembedaan yang tetap di antara "elit" dan "massa". Individu-individu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu waktu tidak dibutuhkan oleh individu yang sama yang berpartisipasi dalam waktu yang lain. Individu masuk dan keluar dalam partisipasinya sebagai pembuat keputusan digolongkan menjadi aktif atau tidak aktif dalam politik.
- d. Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi, kesehatan merupakan aset dalam politik, tetapi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aset politik yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Creswell (2009: 13) *phenomenological research is a strategy of inquiry in which the researcher identifies the essence of human experiences about phenomenon as described by participants* (Penelitian fenomenologi merupakan suatu strategi penelitian dimana peneliti mengidentifikasi inti sari pengalaman manusia tentang fenomena seperti yang dideskripsikan oleh partisipan). Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna di balik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan supaya masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengungkapkan bagaimana Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan.

Manfaat pendekatan ini ditujukan untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti melihat masalah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Straus dan Corbin (1997), metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan difahami.

Pertimbangan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif adalah bahwa dampak kebijakan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa di kuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari kebijakan tersebut. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pertumbuhan PKL telah menjadi isu internasional karena menimbulkan potensi konflik penataan ruang yang akan berdampak negatif bagi ketertiban dan keindahan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh PKL jika PKL sudah

menempati ruang publik kota pada suatu kawasan tertentu sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik tersebut. Kasus yang umum terjadi adalah terganggunya fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki dan fungsi jalan sebagai tempat laju kendaraan bermotor. Dalam kaitan inilah maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kota.

Keberadaan PKL di pusat pertumbuhan ekonomi dan di pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang *urgen* untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali dinilai sebagai faktor penghambat program tata letak dan tata ruang kota yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Diantaranya keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu fasilitas publik, memakai hak publik dalam hal trotoar jalan atau yang lebih kita kenal dengan istilah kembang trotoar.

Perkembangan PKL di kota Pasuruan sangat pesat sekali, hal ini diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan di desa, akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota dengan alasan mencari penghidupan yang lebih layak. Faktor lain diakibatkan dari banyaknya orang-orang yang di PHK dari perusahaan pada akhirnya PKL menjadi pilihan lapangan pekerjaan dengan alasan Usaha PKL dinilai tidak rumit dan sangat memungkinkan orang-orang untuk tetap bisa hidup dalam menopang perekonomiannya.

Keberadaan PKL di kota Pasuruan terutama PKL yang berada di sekitar Kota Pasuruan sudah dinilai sangat memprihatinkan karena keberadaan mereka mengakibatkan banyak faktor negatif, diantaranya mengganggu lancarnya lalu lintas, buruknya pandangan kota karena mereka cenderung bikin kumuh dan kotor sehingga berimbas pada kondisi kota yang tidak sedap dipandang. Pada sudut yang berbeda ada hal positif yang ditimbulkan dengan keberadaan mereka diantaranya, masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan konsumsi yang murah, secara tidak langsung juga dengan keberadaan mereka menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di

Negara Indonesia, Provinsi serta Kabupaten/Kota pada khususnya, Kota Pasuruan juga membuat suatu peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda yang dimaksud adalah Perda No. 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan, Perda ini dibuat dalam rangka menata dan menertibkan PKL yang berada di beberapa tempat strategis wilayah Kota Pasuruan. Tempat-tempat strategis yang biasa ditempati PKL tersebut seperti pinggir-pinggir (bahu) jalan, trotoar, dan beberapa pasar yang berada di Kota Pasuruan.

Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah berkaitan dengan kelancaran lalu lintas, stabilitas sosial yang berkaitan dengan pemakaian fasilitas dan ruang publik seperti bahu jalan, trotoar dan menjaga keindahan dan keasrian Kota Pasuruan serta berupaya mengatur segala bentuk kegiatan PKL baik penataan tempat maupun alokasi waktu diperbolehkannya PKL untuk melakukan kegiatan usahanya. Didalam Perda No. 02 Tahun 2013 menjelaskan beberapa substansi tentang penjelasan PKL, penjelasan tempat atau kawasan yang disahkan bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya, sarana dan prasarana yang dipakai oleh PKL dalam melakukan usahanya, serta penjelasan tentang larangan-larangan serta sanksi-sanksi bagi PKL jika melanggar peraturan tersebut.

Pembinaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari hak Pedagang Kaki Lima. Hal ini sesuai peraturan daerah Nomor 11 tahun 2000, dimana hak-hak Pedagang Kaki Lima meliputi :

1. Mendapatkan Pelayanan Perijinan
2. Tersedianya Lahan Lokasi PKL
3. Mendapatkan Pengatuhan dan Pembinaan

Dalam pandangan Ekonomi politik kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sudah sangat tepat, dalam arti pemerintah juga mengharap dari tertata dan terberdayanya PKL akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan dimana PKL menjadi salah satu penyumbangannya. Disamping itu PKL dalam hal ini juga merasa diuntungkan dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh

sebagai akibat dari terimplementasinya Perda yang berpihak pada PKL.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Erani Yustika, ekonomi politik percaya struktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (*given*). Hal ini dapat dilihat bagaimana sistem politik yang menganut liberalisasi sehingga membuat kita terperosok dalam demokrasi liberal. Demokrasi yang memberi keleluasaan pada siapa saja untuk berkompetisi, asalkan memiliki kemampuan terutama finansial karena mahal biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh para elite ekonomi (pengusaha) untuk ikut berkontestasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada juga yang melakukannya secara tidak langsung dengan menunjuk atau mendukung salah satu kandidat wakil rakyat dengan sokongan dana yang besar.

Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain kekuasaan tertentu dari sistem ekonomi yang berlangsung, sehingga Ahmad Erani Yustika mengatakan pendekatan ekonomi politik dalam prakteknya selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian wajar jika kebijakan selalu mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Apalagi sekarang, Indonesia memasuki fase perpolitikan era desentralisasi. Sistem politik yang terbuka dan lemahnya kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan sehingga kebijakan ekonomi sangat rentan dengan kepentingan politik. Terlebih sejalan dengan konsep demokrasi kita yang liberal dan ekonomi yang neoliberal, maka politik akan terjebak pada biaya politik yang mahal. Tak pelak lagi, kekuasaan pemodal yang memainkan peran besar dalam kebijakan ekonomi. Hingga berujung pada pendiktean institusi politik maupun ekonomi yang diarahkan pada kepentingan para pemilik modal.

KESIMPULAN

Perda No. 02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kota Pasuruan dalam bentuk Perda No. 02 Tahun 2013 sudah tepat sasaran, keberadaan PKL di Kota Pasuruan lebih bisa tertata dan tertib. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Pasuruan melakukan langkah pemberdayaan guna melangsungkan keberadaan PKL di Kota Pasuruan lebih bisa diuntungkan dalam hal keberlangsungan menjalankan dagangannya.

Peran aktor dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 02 Tahun 2013 ini merupakan kunci keberhasilan dari perda tersebut. Dimana dalam hal ini aktor implementornya adalah Dinas Koperasi dan Perindustrian Dagang Kota Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pedagang Kali Lima itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab SA. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lester, James P dan Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Second Edition. Thomson Learning. USA.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemah Tri Wibowo Budi Santoso. Edisi Pertama. Prenanda Media Group. Jakarta.
- William N Dunn , (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta, Gajahmada University press
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, Mochtar. 2008. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lester, James P dan Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Second Edition. Thomson Learning. USA